

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa perangkat daerah dituntut harus memiliki pelayanan publik terbaik secara transparan dan berkualitas sehingga dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pada PP No 8 tahun 2006 bahwa pemerintahan daerah harus melaporkan keuangan serta harus melampirkan informasi kinerja pemerintahan daerah. Penilaian kinerja pemerintahan daerah ini sangatlah penting hal ini dilakukan agar dapat menilai berhasil atau tidaknya kinerja pemerintahan daerah terhadap pelayanan publik. Menurut Aisyah, (2014) penilaian kinerja pemerintahan daerah ini sangat lah penting untuk mengetahui hasil kinerja periode lalu dan digunakan untuk menyusun strategi pada periode berikutnya.

Menurut Pratiwi, (2011) kinerja pemerintahan daerah sering dianggap gagal dan dinilai buruk oleh masyarakat karena pemerintah telah gagal dalam menentukan perencanaan strategi dan juga melakukan pemantauan. Banyak juga peyalahan wewenang yang dilakukan oleh oknum pemerintahan daerah seperti penyalahgunaan anggaran daerah dan pengelembungan dana untuk digunakan sendiri atau untuk mensejahterakan dirinya sendiri atau kelompok (korupsi).

Sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2]: 188 dan HR Abu Daud

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah sebahagia kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]:188)

“Rasulullah melaknat penyuap dan orang yang menerima suap.”(HR Abu Daud)

Dengan adanya ayat diatas sudah diingatkan bahwasanya aparatur pemerintahan daerah tidak boleh melakukan kecurangan yang bertujuan untuk mementingkan diri sendiri atau kelompok yang dapat merugikan masyarakat seperti melakukan Tindakan suap menyuap dan juga melakukan tindakan korupsi uang rakyat. Dari HR Abu Daud bahwa orang yang melakukan tindakan suap menyuap maka mereka akan mendapatkan laknat dari Rasulullah. QS. Al-Baqarah [2]: 188 dan HR Abu Daud sesuai dengan pemerintah daerah bahwasanya pemerintah daerah harus mementingkan masyarakat dan juga memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Melakukan Tindakan yang adil kepada masyarakat tidak menyalahgunakan jabatan untuk melakukan Tindakan korupsi dan melanggar hukum yang sudah ditetapkan.

Menurut hasil survei nasional pemerintah Daerah mengenai pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsmen Republik Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kenyataannya hanya mendapatkan nilai sedang dalam kepatuhan dan masuk kedalam zona kuning. Nilai yang didapatkan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mendapatkan nilai rata-rata 71,15 atau hanya masuk dalam kategori sedang. Kabupaten di daerah Istimewa Yogyakarta sendiri tidak ada yang memiliki nilai kepatuhan tinggi menurut kepala ORI. Kepuasan pelayanan SKPD masih banyaknya kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat pada kinerja aparatur pemerintah daerah dalam segi pelayanan publik dan transparansi dalam laporan keuangan. Masyarakat sendiri sering mengeluhkan tentang pelayanan publik aparatur pemerintah daerah yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena pengabaian standar pelayanan

publik sehingga berakibat pada pelayanan pada masyarakat yang berkurang. Selain itu juga banyaknya perilaku koruptif yang menyebabkan pelayanan menurun seperti meminta uang pelican untuk mempercepat proses yang dilakukan di Pemerintahan Daerah.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pelayanan publik SKPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak dirasakan oleh masyarakat dan juga banyaknya kegiatan-kegiatan negative pada pemerintah daerah, standar pelayanan public SKPD di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih dibawah standar yaitu masih dibawah 50 (sangat kurang). seharusnya Satuann Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat karena salah satu tugas pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Apalagi di era revormasi ini pelayanan publik menjadi salah satu tolak ukur apakah pemerintah tersebut berjalan dengan baik ataupun tidak baik. Sehingga pemerintah daerah didorong untuk mengelola jasa pelayanan kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkannya. Maka untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengelolaan pemerintahan daerah yang professional. Ada berbagai cara dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Menurut FCGI (2002) dengan adanya good governance memiliki manfaat yang sangat penting bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) salah satunya dapat meningkatkan pelayanan kepada publik menjadi lebih baik serta tercapainya pengambilan keputusan yang baik dan juga dapat meningkatkan operasional pemerintah daerah. Pengambilan keputusan yang tepat diharapkan dapat memberikan hal positif pada kinerja pemerintahan daerah yang terus meningkat. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dari yang kurang baik menjadi semakin lebih baik, hal ini dapat membuktikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dengan apa

yang dilakukannya sehingga menimbulkan rasa percaya dari masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan adanya otonomi daerah menjadikan tuntutan kepada aparaturnya pemerintah untuk menerapkan prinsip *good governance* sehingga dapat menjadikan kinerja aparaturnya pemerintah daerah menjadi lebih terstruktur dan dapat berjalan dengan lancar dalam pelaksanaan tugas. Menurut Azlina & Amelia, (2015) *Good governance* sangat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan daerah, sedangkan menurut Trisnaningsih, (2007) *good governance* ini diharapkan mampu memberikan hal positif terhadap pemerintahan daerah, dan juga dapat membuat kinerja pemerintahan daerah menjadi semakin lebih baik, dapat dipercaya dan juga efektif.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fimela, (2011) bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuda, (2012) yang juga menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selain *good governance*, faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu gaya kepemimpinan (*leadership style*). Gaya kepemimpinan ini sangatlah berperan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Seorang pemimpin harus memiliki perilaku yang baik dan dapat mempengaruhi bawahannya untuk melakukan Tindakan-tindakan yang baik serta tidak menyalahgunakan jabatannya. Salah satu cara seorang pemimpin memberikan pengaruh positif terhadap bawahannya yaitu dengan cara memberikan motivasi dan juga menumbuhkan semangat bekerja untuk kepentingan bersama, seorang pemimpin juga harus memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya. Karena seorang pemimpin menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Menurut Hidayat, (2014) gaya kepemimpinan

adalah perilaku seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan juga dapat mempengaruhi bawahannya supaya dapat melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari penelitian sebelumnya banyak yang meneliti mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah daerah. Seperti penelitian yang dilakukan Habsoro, A, (2011) bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, penelitian yang dilakukan Elya, (2010) menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan Maryati *et al.*, (2013) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selain *good governance* dan gaya kepemimpinan kinerja pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu nilai, keyakinan atau norma norma yang telah disepakati dan juga dilaksanakan oleh para anggota organisasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam memecahkan masalah internal maupun eksternal dalam organisasi, juga dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku anggota organisasi. Oleh karena itu penerapan budaya organisasi ini sangat penting pada kinerja pemerintah daerah, untuk meminimalisir terjadinya konflik pada pemerintah daerah dan juga pada pemerintah pusat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sardjito & Muthaher, (2007) bahwasannya budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Herlin, (2010) pada penelitiannya yang berjudul pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi, dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *good governance*, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian tentang kinerja pemerintah daerah mulai banyak dilakukan penelitian akan tetapi kebanyakan mereka melakukan penelitiannya diluar pulau jawa, mereka biasanya melakukan penelitian didaerahnya mereka sendiri. Akan tetapi penelitian tentang kinerja pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat sedikit.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian yaitu Prayoga, (2017), Istiqomatunnisa et al., (2017) dan Claraini et al., (2017). Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Prayoga, (2017) dilakukan di Kabupaten Pelalawan, penelitian Istiqomatunnisa et al., (2017) dilakukan di Kabupaten Siak, penelitian Claraini et al., (2017) di Kabupaten Rokan Hilir sedangkan penelitian ini dilakukan pada SKPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alasan pada tahun 2021 SKPD di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta masih mendapatkan penilaian yang buruk terhadap pelayanan publik.

Dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai kinerja pemerintah daerah di SKPD provinsi DIY. Sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kinerja pemerintah daerah pada SKPD di DIY. Dari latar belakang diatas maka judul dari penelitian ini “Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Dari penelitian ini peneliti ingin menguji kinerja pemerintah daerah SKPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang jarang dilakukan oleh peneliti.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti yakni “pengaruh *good governance*, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah”, pada pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah daerah
3. Menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan mampu memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

1. Dalam bidang teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada kajian tentang kinerja pemerintah daerah SKPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dapat membantu memecahkan masalah dari segi *good governance*, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari penelitian ini terdapat bukti-bukti

empiris yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah dengan cara memperbaiki *good governance*, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pemerintah untuk mengetahui fenomena yang terjadi dipemerintah daerah, serta memberikan kontribusi dalam kinerja pemerintah daerah dengan cara memberikan masukan dan saran mengenai *good governance*, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang dianggap oleh peneliti mampu memberikan dampak positif bagi kinerja pemerintah daerah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi masyarakat mengenai *good governance*, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi dalam kinerja pemerintah daerah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menjadi penambah wawasan.